CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 disusun untuk menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya dan catatan atas laporan keuangan berbasis akrual.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru terdiri dari:

a. Neraca
b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c. Laporan Operasional (LO)
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup secara langsung Neraca terdiri dari:

a. Aset Lancar
b. Aset Tetap
c. Aset Lainnya
d. Kewajiban Jangka Pendek
e. Kewajiban Jangka Panjang
f. Ekuitas Dana

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a. Pendapatan-LRA
b. Belanja
c. Transfer
d. Surplus/Defisit
e. Pembiayaan
f. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung Laporan Operasional terdiri dari:

a. Pendapatan-LO
b. Beban
c. Transfer
d. Pos Luar Biasa

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai berikut :

I. Neraca
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
III. Laporan Operasional (LO)
IV. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- A. Kebijakan Umum Anggaran
- B. Pencapaian Target Kinerja

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
- A. Komponen Neraca
  - 1. Aset
  - 1.1 Aset Lancar

1.1.1 Kas Bendahara Pengeluaran
1.1.2 Belanja Dibayar Di Muka
1.1.3 Persediaan
1.2 Aset Tetap
1.2.1 Tanah
1.2.2 Peralatan dan Mesin
1.2.3 Gedung dan Bangunan
1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
1.2.5 Aset Tetap Lainnya
1.2.6 Akumulasi Penyusutan
1.3 Aset Lainnya
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana

B. Komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
4. Pendapatan-LRA
5. Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.1 Belanja Pegawai
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.2 Belanja Modal

C. Komponen Laporan Operasional (LO)
8. Pendapatan-LO
9. Beban
9.1 Beban Operasi

D. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
A. Data Umum
B. Struktur Organisasi

BAB VI PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Kebijakan Umum Anggaran

Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan ke dua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2017 DPM&PTSP Kota Banjarbaru mempunyai 1 (satu) Urusan Wajib yang harus dilaksanakan dan dipertagungjawabkan pada akhir tahun melalui urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian.

Klasifikasi Belanja tersebut di atas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan, ke dalam satu organisasi. Disamping itu belanja juga diklasifikasikan menurut Program dan Kegiatan, menurut kelompok belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja Pegawai saja.

Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

B. Pencapaian Target Kinerja

Rencana kerja SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana kinerja berisikan sasaran, indikator sasaran / indikator kinerja seperti digambarkan dalam tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di bidang Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	1. Nilai/Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik/Sangat Baik
		2. Jumlah Izin, Non Izin dan Izin PMDN yang diterbitkan
2.	Meningkatkan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat	3. Persentase Aduan/Keluhan Masyarakat yang di selesaikan
		4. Jumlah Perizinan yang dapat diakses secara *online*
3.	Meningkatkan Jumlah Penanaman Modal	5. Nilai Investasi PMDN
		6. Nilai Investasi PMA

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun 2017 secara keseluruhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Banjarbaru telah memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 5.520.245.183,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.201.087.382,**- **(94,22%)** terdiri dari :

a. Anggaran belanja tidak langsung, (belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai) sebesar **Rp. 3.515.794.000,-** dengan realisasi sebesar Rp**. 3.320.901.025,- (94,46%),**

b. Anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 2.004.451.183,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.880.186.357,- (93,80%)** yang dialokasikan untuk melaksanakan 7 program dan 37 kegiatan.

Dapat dirinci pada tabel dibawah:

Dalam Rupiah

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
I	Belanja Tidak Langsung	3.515.794.000,00	3.320.901.025,00	194.892.975,00
II	Belanja Langsung	2.004.451.183,00	1.880.186.357,00	124.264.826,00
Jumlah		5.520.245.183,00	5.201.087.382,00	319.157.801,00

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada tahun 2017 tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada DPM&PTSP Kota Banjarbaru.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. KOMPONEN NERACA

1. Aset

1.1 Aset Lancar

Nilai Aset lancar periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp 18.021.700,-**

1.1.1 Kas Bendahara Pengeluaran

1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan barang terakhir (Berita Acara Hasil Opname sebagaimana terlampir dalam Lampiran Tambahan).

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2017 sebesar **Rp 18.021.700,-** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	Nama/Jenis Persediaan	Jumlah
1	Alat Tulis Kantor	579.200,00
2	Bahan Cetakan	13.902.500,00
3	Bahan baku bangunan	3.540.000,00
	Jumlah	**18.021.700,00**

1.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp 2.425.556.188,70** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	Uraian	2017	2016
1	Tanah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.676.811.659,18	1.543.121.659,18
3	Gedung dan Bangunan	832.135.000,00	832.135.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(1.298.390.470,48)	(1.055.758.322,74)
	Jumlah Aset Tetap	**2.425.556.188,70**	**2.534.498.336,44**

Selama Tahun 2017 mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Penambahan

- Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 156.735.000,-** dengan rincian sebagai berikut:
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama tahun 2017 sebesar **Rp. Rp. 156.735.000,-**

b. Pengurangan

- Pengurangan aset tetap selama tahun 2017 sebesar **Rp. 289.402.147,74,-** dengan rincian sebagai berikut :
  - Reklas Antar KIB **Rp. 17.625.000,-**
  - Penghapusan aset tetap sebesar **Rp. 7.120.000,-**
  - Penyusutan Tahun 2017 sebesar **Rp. 264.657.147,74,-**

1.2.1 Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp 1.200.000 000,-**

1.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp 1.676.811.659,18**, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	Uraian	2017
1	Alat-alat Angkutan	641.006.759,18
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	62.286.885,26
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	921.719.014,74
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	27.299.000,00
5	Alat Keamanan	24.500.000,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin	**1.676.811.659,18**

1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp 832.135.000,-**

1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 15.000.000,-**

1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2017 adalah **Nihil**

1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru, penyusutan aset menggunakan metode garis lurus.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 1.298.390.470,48** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Uraian	2017
Akumulasi Penyusutan s.d. Tahun 2016	**1.055.758.322,74**
Akumulasi Penyusutan Gedung	166.427.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	887.081.322,74
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.250.000,00
Biaya Penyusutan Tahun 2017	**264.657.147,74**
Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.803.375,00
Penyusutan Peralatan dan Mesin	243.103.772,74
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	750.000,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2017	**1.320.415.470,48**
Penghapusan Akumulasi Penyusutan 2017	22.025.000,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2017	**1.298.390.470,48**

Nilai penyusutan diperoleh dari hasil rekon dan restatement aset dengan DPPKAD (Rekon dan restatement aset sebagaimana terlampir dalam lampiran tambahan).

1.3 Aset Lainnya

1.3.1 Aset Tak Berwujud

Nilai aset tak berwujud periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 288.529.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No.	Uraian	2017
1.	Aplikasi Peta Investasi	38.200.000,00
2.	Aplikasi SMS Center Pelayanan Perizinan	71.349.000,00
3.	Aplikasi Arsip Elektronik	34.500.000,00
4.	Aplikasi Papan Informasi Touchscreen	45.980.000,00
5.	Aplikasi Website	49.500.000,00
6.	Aplikasi Database Reklame Berbasis Pemetaan	49.000.000,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	**288.529.000,00**

1.3.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset tak berwujud periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 249.933.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

Uraian	2017
Amortisasi s.d Tahun 2016	209.767.200,00
Amortisasi 2017	40.165.800,00
Amortisasi s.d Tahun 2017	**249.933.000,00**

2. Kewajiban

2.1 Kewajiban Jangka Pendek

2.1.1 Utang Beban

Nilai Utang Beban periode 31 Desember 2017 sebesar Rp. 5.552.577,- merupakan utang beban dengan rincian sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No.	Uraian	2017
1.	Belanja Telepon untuk Bulan Desember 2017	174.621,00
2.	Belanja Air untuk Bulan Desember 2017	277.340,00
3.	Belanja Listrik untuk Bulan Desember 2017	3.854.241,00
4.	Belanja Faksimili/ Internet	986.375,00
5.	Belanja Surat Kabar/Majalah	260.000,00
Jumlah Utang Belanja		**5.552.577,00**

2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka periode 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp 91.652.802,54** dengan rincian sebagai berikut **:**

Dalam Rupiah

No	Uraian	2017
1.	Saldo awal pendapatan diterima dimuka	74.826.923,46
2.	Realisasi Pendapatan diterima dimuka	(65.125.250,17)
3.	Pendapatan diterima dimuka 2018	81.951.129,25
	Pendapatan diterima dimuka 2017	**91.652.802,54**

2.1.3 Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan ke PPKD periode 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 3.329.195.682,-**.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah, adapun Nilai Ekuitas Dana Per 31 Desember 2017 sebesar (**Rp. 942.497.172,84**) Dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No.	Uraian	2017	2016
1	Aset Lancar	18.021.700,00	18.151.000,00
2	Aset Tetap	2.425.556.188,70	2.534.498.336,44
3	Aset Lainnya	40.326.000,00	78.825.800,00
4	Kewajiban	(3.426.401.061,54)	(80.907.813,46)
	Ekuitas Dana	**(942.497.172,84)**	2.550.567.322,98

B. KOMPONEN LRA

4. Pendapatan-LRA

4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan asli daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 1.871.891.700,-** dari anggaran **Rp. 4.732.000.000**,- atau **39,56%.**

4.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan retribusi daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 1.871.891.700,-** dari anggaran **Rp. 4.732.000.000**,- dengan rincian sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No.	Uraian	2017
1	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi	95.037.465,00
2	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Badan	216.939.465,00
3	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.559.914.770,00
	Jumlah	**1.871.891.700,00**

5. Belanja

5.1 Belanja Operasi

Realiasasi Belanja Operasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp5.520.245.492.183,-** atau sebesar **94,22%** dari anggaran **Rp5.201.087.382,-**

5.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 3.335.976.025,-** atau sebesar **94,44%** dari anggaran **Rp 3.532.544.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	Uraian	2017
1	Belanja Tidak Langsung	**3.320.901.025,00**
	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.307.853.484,00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.013.047.541,00
2	Belanja Langsung	**15.075.000,00**
	Honorarium PNS	15.075.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	**3.335.976.025,00**

5.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp. 1.708.376.357,-** atau sebesar 93,39% dari anggaran **Rp 1.829.291.183**,- dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	Uraian	2017
1	Honorarium Non PNS	167.040.000,00
2	Belanja Bahan Pakai Habis	177.402.050,00
3	Belanja Bahan/Material	23.900.000,00
4	Belanja Jasa Kantor	322.006.794,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.390.243,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.866.900,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170.772.750,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	224.240.000,00
9	Belanja Pakaian Kerja	34.700.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	301.607.620,00
11	Belanja Pemeliharaan	122.450.000,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**1.708.376.357,00**

5.1.3 Belanja Modal

Realiasasi Belanja DPM & PTSP Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp 156.735.000,-** atau sebesar **98,94%** dari anggaran **Rp 158.410.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No.	Uraian	2017
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	24.800.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	101.330.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	5.980.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.125.000,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	17.500.000,00
	Jumlah Belanja Modal	**156.735.000,00**

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

8. Pendapatan - LO

8.1 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan retribusi daerah berdasarkan Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat saldo sebesar **Rp 1.855.065.820,92**

9. Beban

9.1 Beban Operasi

Realisasi belanja di Tahun Anggaran 2017 terdapat realisasi belanja yang tidak menjadi beban di Tahun Anggaran 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Realisasi	Penyesuaian	LO
1	Beban Pegawai	3.335.976.025,00	-	3.335.976.025,00
2	Beban Barang dan Jasa	1.708.376.357,00	(399.013,00)	1.707.977.344,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	304.822.947,00	304.822.947,00

Penyesuaian Beban Operasi rinciannya sebagai berikut:

Jurnal Penyesuaian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2017

dalam Rupiah

Uraian	Debet	Kredit
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	191.000,00	
Persediaan Alat Tulis Kantor		191.000,00
(Jurnal Balik Persediaan ATK tahun 2016)		
Beban Cetak	15.530.000,00	
Persediaan Bahan Cetakan		15.530.000,00
(Jurnal Balik Persed. Bahan Cetakan thn 2016)		
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	2.430.000,00	
Persediaan Bahan Baku Bangunan		2.430.000,00
(Jurnal Balik Persed. Bahan Bangunan thn 2016)		
Utang Beban Barang dan Jasa	6.080.890,00	
Pemabayaran Utang Beban tahun 2016		6.080.890,00
Persediaan Alat tulis Kantor	579.200,00	
Beban Persedian Alat Tulis Kantor		579.200,00
Persediaan Bahan Cetakan	13.902.500,00	
Beban Cetak		13.902.500,00
Persediaan Bahan Baku Bangunan	3.540.000,00	
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan		3.540.000,00
Beban Jasa Telepon	174.621,00	
Beban Jasa Air	277.340,00	
Beban Jasa Listrik	3.854.241,00	
Beban Jasa Surat Kabar	260.000,00	
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	986.375,00	
Utang Beban Barang dan Jasa		5.552.577,00

Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2017

dalam rupiah

Uraian	Debet	Kredit
Beban Penyusutan Aset Tetap	20.803.375,00	
Akumulasi Penyusutaan Gedung dan Bangunan		20.803.375,00
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	243.103.772,74	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		243.103.772,74
Beban Penyusutan Aset Tetap	750.000,00	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		750.000,00
Beban amortisasi aset tidak berwujud lainnya	40.165.800,00	
Amortisasi Aset tidak berwujud lainnya		40.165.800,00
	304.822.947,74	**304.822.947,74**

C. KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perubahan ekuitas pada DPM & PTSP Kota Banjarbaru per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Dalam Rupiah

No	URAIAN	2017	2016
1	EKUITAS AWAL	2.550.567.322,98	-
2	SURPLUS/DEFISIT - LO	(3.494.510.495,82)	-
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
	Akumulasi Penyusutan Kurang Catat Aset 2016	(190.000,00)	-
	Lebih Catat Aset thn 2016	(64.000,00)	-
	Kurang Catat Aset 2016	1.700.000,00	-
	EKUITAS AKHIR	**(942.497.172,84)**	**2.550.567.322,98**

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIMDA. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. Data Umum

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru berdasarkan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah);
3. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;

6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Kepala Daerah di bidang koordinasi, sinkronisasi pelayanan perizinan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan perizinan secara terpadu sesuai kebijakan walikota ;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal;
c. Pembinaan, pengembangan pelayanan perizinan, non perizinan, perizinan paralel dan penanaman modal ;
d. Peningkatan pelaksanaan tugas lingkup pelayanan pelayanan perizinan, non perizinan,perizinan paralel dan penanaman modal ;
e. Pelaksanaan pendaftaran,pengklasifikasian dan pemeriksaan pelayanan perizinan, non perizinan, perizinan paralel dan penanaman modal ;
f. Pengevaluasian pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan,perizinan paralel dan penanaman modal ;
g. Peningkatan pengembangan aparatur di bidang pelayanan ;
h. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan, perizinan paralel ;
i. Pengkoordinasian dan pengkajian data potensi unggulan daerah dalam penanaman modal ;
j. Pengendalian dan evaluasi penanaman modal ;
k. Pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kesekretariatan ;

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas yang terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan;
   c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
   a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
   b. Seksi Pengendalian Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi Tim Teknis terdiri atas:
   a. Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan;
   b. Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
5. Bidang Pelayanaan Perizinan Tertentu membawahi Tim Teknis terdiri atas:
   a. Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal;
   b. Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame;
6. Bidang Informasi dan Pengaduan terdiri atas:
   a. Seksi Data dan Informasi Perizinan;
   b. Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Tahun Anggaran 2017 ini dibuat. Akhirnya semoga Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama. Sehingga kita mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara dan Daerah yang kita cintai bersama.

Banjarbaru, 31 Desember 2017

KEPALA DPM & PTSP KOTA BANJARBARU

Ir. H. FAHRUDIN
Nip. 19611216 198903 1 006